



JURNAL SOSIAL POLITIK

Volume 1 ■ Nomor 1 ■ Agustus 2011

<http://www.fisip.unpad.ac.id/journal/a>

*Policy, Technology and Democracy:
A Case Study of Pangea Australia (1999-2000)*

Faktor Lingkungan Dalam Kebijakan Publik

Wacana Budaya Ruang Terbuka Hijau

Kebijakan Migrasi Lintas Negara Pemerintahan Indonesia:
Study Kasus Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia di Era SBY

Keputusan Hukum Sebagai Perilaku Budaya

Peranan Pekerja Sosial Medis dalam Meningkatkan
Kualitas Keselamatan Pasien di Indonesia

Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional
Terhadap Pasar Modern di Kota Cirebon

Kombinasi Metode *Promethee* dan *Analityc Hierarchy Process*
dalam Penentuan Lokasi Calon Ibukota bagi Daerah Otonom Baru

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

V/19



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
<i>Policy, Technology and Democracy: A Case Study of Pangea Australia (1999-2000)</i>	1
Faktor Lingkungan Dalam Kebijakan Publik	8
Wacana Budaya Ruang Terbuka Hijau	18
Kebijakan Migrasi Lintas Negara Pemerintahan Indonesia: Study Kasus Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia di Era SBY	25
Keputusan Hukum Sebagai Perilaku Budaya	35
Peranan Pekerja Sosial Medis dalam Meningkatkan Kualitas Keselamatan Pasien di Indonesia	48
Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern di Kota Cirebon	57
Kombinasi Metode <i>Promethee</i> dan <i>Analityc Hierarchy Process</i> dalam Penentuan Lokasi Calon Ibukota bagi Daerah Otonom Baru	69
Petunjuk Bagi Calon Penulis JURNAL SOSIAL POLITIK	84
Form Pendaftaran Personal/Lembaga	
Form Berlangganan JSP Non Anggota	



KATA PENGANTAR

Jurnal Sosial Politik atau *JSP* adalah jurnal enam bulanan, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Isi tulisan jurnal menampung tulisan dari ilmu sosial dan ilmu politik ditelaah oleh berbagai mitra bebestari terpilih dari dalam dan luar FISIP UNPAD.

Dalam edisi perdana *JSP* menampilkan beberapa tulisan dari FISIP UNPAD berupa penelitian dan hasil pemikiran dari cabang keilmuan ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya ilmu administrasi publik, ilmu pemerintahan, antropologi, kesejahteraan sosial dan hubungan internasional. Namun, tentunya penyunting tidak menutup kemungkinan untuk menerima sumbangan makalah dari berbagai ilmu sosial lainnya terutama berkaitan dengan bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan.

Makalah pertama menyajikan konsepsi lingkungan dengan kebijakan publik; bagaimanakah lingkungan dan kebijakan mempengaruhi pembuat kebijakan publik. Kemudian dalam makalah kedua ditampilkan kebijakan migrasi lintas negara dari Indonesia ke Malaysia terutama berkaitan dengan kebijakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan penanganan serta penanggulangan masalah-masalah TKI di negeri jiran tersebut semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Makalah ketiga menyajikan tulisan tentang budaya ruang terbuka hijau di perkotaan, dengan penekanan taman dan ruang terbuka hijau di berbagai perkotaan Indonesia yang bertujuan memperbaiki sosio-budaya masyarakat perkotaan. Makalah keempat menyajikan tulisan mengenai pekerja sosial dalam bidang kesehatan terutama para perawat yang menjalani pekerjaannya sebagai profesional dan juga pekerja dalam bidang sosial. Tulisan keempat mengenai bagaimana menciptakan sinergi antara kebijakan, teknologi dan demokrasi di Australia dalam proyek pembangunan di Pangea, Australia.

Tulisan kelima menyajikan uraian mengenai keputusan hukum sebagai salah satu bentuk perilaku budaya birokrasi di Indonesia. Hukum-hukum formal untuk menyelesaikan berbagai sengketa antara berbagai organisasi di berbagai daerah di Indonesia, seperti yang dicontohkan dalam adat nagari di Minangkabau, Sumatera Barat. Tulisan keenam menyajikan uraian mengenai upaya peningkatan daya saing pasar tradisional terhadap keberadaan pasar modern di Kota Cirebon. Dan tulisan terakhir menyajikan uraian mengenai kriteria dan teknik pengambilan keputusan dalam penentuan calon ibukota bagi daerah otonomi baru, melalui penggunaan kombinasi metode *Promethee* dan *Analityc Hierarchy Process*.

Bandung, 30 Agustus 2011
Ketua Dewan Penyunting

FAKTOR LINGKUNGAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

ASEP SUMARYANA

asepsumaryana_asum@yahoo.com

Faktor lingkungan tidak dapat diabaikan oleh setiap perumus ataupun pelaksana kebijakan. Mengabaikan faktor ini bisa berdampak fatal sebab akan menggagalkan tujuan negara menyejahterakan rakyatnya. Oleh sebab itu, kajian lingkungan perlu terus dilakukan lebih dalam dan luas agar faktor ini dapat diantisipasi dampak negatifnya terhadap upaya pemerintah dalam memajukan masyarakatnya. Lingkungan dari kebijakan publik sendiri memerlukan berbagai macam informasi untuk memperkuat suatu kebijakan lebih memadai untuk dilaksanakan. Faktor nilai dan budaya menjadi alasan dasar ketika suatu lingkungan kebijakan mempengaruhi suatu keputusan. Berbagai keputusan berupa kebijakan ini perlu mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal sehingga kebijakan ini mampu diterima oleh masyarakat kebanyakan, dimana masyarakat ini adalah para stakeholders sebagai penilai terakhir suatu kebijakan.

Kata Kunci: Lingkungan dan Kebijakan Publik

Abstract

Environmental factors can not be ignored by any drafting or implementing policies. Ignoring these factors can affect fatal because the welfare state would thwart the purpose of his people. Therefore, environmental studies need to be made deeper and broader for these factors can be anticipated adverse impact on the government's efforts in advancing society. Environment of public policy itself requires various kinds of information to strengthen a more adequate policy to be implemented. Factors and cultural values into the basic reason when a policy environment influencing a decision. Various decisions of this policy need to consider internal and external environments so that these policies can be accepted by the majority community, where people are the stakeholders as a final assessment of a policy.

Key Words: Environment and Public Policy

Pendahuluan

Kebijakan publik akan gagal mengatasi beragam persoalan kemasyarakatan ataupun kenegaraan. Tidak saja akibat penyimpangan, namun, mungkin disebabkan kebijakan publik tersebut sulit dilaksanakan karena banyak mengandung kelemahan. Oleh karena itu, kebijakan publik sebagai bagian dari masalah yang harus dipecahkan. Kebijakan publik menjadi bagian dari permasalahan, kemungkinan akibat kebijakan tersebut telah bermasalah dalam proses penyusunannya, pelaksanaannya, bahkan tatkala dievaluasi. Dalam proses tersebut, kebijakan tidak

terbebas dari pengaruh yang ditimbulkan oleh lingkungan, sehingga dalam tahapan apa pun kebijakan senantiasa terinfiltrasi oleh faktor lingkungan saat kebijakan tersebut dibuat, dilaksanakan dan juga dievaluasi.

Dunn (1981) mengingatkan, bahwa lingkungan dapat menyebabkan gagalnya kebijakan ketika diimplementasikan, atau tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Kebijakan, menurutnya, terkait dengan stakeholder dan lingkungan karena sebuah kebijakan biasanya berisi pengaruh lingkungan. Stakeholder pun berkaitan erat dengan lingkungannya pula. Oleh sebab itu, lingkungan perlu direspon sebagai masukan yang memberikan warna terhadap kebijakan,

¹Kepala LP3AN dan Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unpad